



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG
BALANTAI TIMUR**

NOMOR :30 /Kpts/WN/BBB-TMR/2021

TENTANG

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN POKJA NAGARI SEHAT
KENAGARIAN BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
PERIODE 2021 S/D 2023**

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR,

Menimbang :

- a . bahwa Nagari Sehat adalah Nagari yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui berdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Nagari yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang Syarat – Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

4. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Nagari Sehat di wilayahnya.
5. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok Kerja di Nagari Punggasan Utara.
6. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pengembangan Nagari Sehat.
7. Memfasilitasi pemberdayaan potensi lokal masyarakat menjadi sumber daya pembangunan Kesehatan.
8. Mewujudkan Mobilitas Pendanaan Masyarakat dengan memanfaatkan potensi masyarakat sehingga berdayaguna mendukung kegiatan di Nagari, dalam rangka mewujudkan Nagari Sehat.
9. Melaksanakan Kegiatan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) untuk mendukung pencapaian kegiatan Kabupaten, Kecamatan dan Nagari Sehat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Koto Panjang

Pada tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR



LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

NOMOR : 30/Kpts/WN/BBB.TMR/2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur Tentang Pembentukan Pokja Nagari Sehat Kenagarian Barung-Barung Balantai Timur Tahun 2021

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	ZAINAL, S.Ag	KETUA
2.	SUSI SUSANTI, S.Pd.I	Wakil ketua I
3.	LAIRIN FAJRIANI	Wakil Ketua II
4.	CHARLES MESRA EDISON, S.Pt	Sekretaris
5.	FITRIAWATI, S.Pd	Wakil Sekretaris
6.	ZAKARIA, S.Pd	Bendahara
7.	NERI NOFRIKA YENI, A.Md.Keb	Ketua Bidang Kemitraan
8.	FUJI HASTUTI	Anggota
9.	YULIARTI	Anggota
10.	RADILA VIZANA	Anggota
11.	MEDIA ROSA, S.Pd	Ketua Bidang Peran Serta Masyarakat
12.	WIDYA WATI	Anggota
13.	KURNIAWATI	Anggota
14.	EMA SURYANI	Anggota
15.	NIKE SURYANI	Anggota
16.	YUNI VERA RAHMADANI, A.Md.Keb	Ketua Bidang Promosi Program
17.	LIZA WATI	Anggota
18.	JUNI FITRIANI	Anggota
19.	EVIDAWATI	Anggota

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

